PENGARUH PERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung)

"The influence of The Applicantion Performance-Bassed Budget And The Clarity of Target Budget Against The Performance Accountability of Government Agencies

(Case study on civil state apparatus BPKA Bandung)

Oleh :

Polikarpus Dwi Krispahanripi

21112001

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted on The agency's financial management and assets of Bandung. The phenomenon is happening is performance accountability of civil state apparatus is still low, this is because the civil affairs apparatus yet maximize the performance and clarity of the target budget. This research aims to find out how big an influences (1) The application of performance-based budgets against the performance accountability of government agencies. To find out how big an influences, (2) clarity of the target budget against the performance accountability of government agencies on the agency's financial management and assets of Bandung.
The method used are descriptive and verifikatif. Methods of analysis using the method of multiple linear regression analysis. The population in this research is 80 civil affairs apparatus on The Agency's financial management and assets of Bandung and the sampling method using saturated.
The results of hypothesis testing in this study indicate that (1) *the application of performance-based budgets influential significantly to performance accountability of government agencies on The agency's financial management and assets of bandung*, (2) *the clarity of the target budget influential significantly to performance accountability of government agencies on The agency's financial management and assets of bandung*.

Keywords: the application of performance-based budgets, the clarity of the target budget, the performance accountability of government agencies.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Direktur Pusat Kajian Politik Ekonimi dan Pengembangan (Puskapol Ekbang) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Holid Nurjamil menerangkan, penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemkab KBB mendapatkan nilai C sangat memalukan. Nilai C berarti 30-50 atau

berada di rangking kedua terbawah. “Memalukan jika penilaian ini diperoleh Bandung Barat, jika diskoring nilainya antara 30-50 atau dengan kata lain nilainya agak kurang” (Holid Nurjamil, 2016).
Menurut Seksi Akuntansi, Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Akuntansi BPKA kota Bandung, Dudi menyatakan “Masih banyak pegawai yang belum mengerti anggaran berbasis kinerja”. Walaupun sudah ada sosialisasi tetapi masih banyak yang belum mengerti dan masih perlu banyak belajar mengenai anggaran berbasis kinerja melalui sosialisasi maupun autodidak (Dudi; 2016).
Menurut Jokowi (2015), perlu ada kejelasan mengenai penggunaan dana bansos. Apalagi, dana tersebut tersebar di sejumlah kementerian. Sehingga, diharapkan tidak tercampur dengan belanja barang. Oleh karena itu, Jokowi meminta dibuat perencanaan yang jelas dan lebih sederhana. Sehingga, pencairannya lebih transparan dan bansos dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan atau tepat sasaran (Jokowi; 2015).
Angka kemiskinan di Jawa Barat tahun 2016 turun ke angka 8,95 persen. Angka tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016. Sementara, pada akhir tahun 2015 data menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 9,57 persen. Menurut Deddy, pendekatan dapat dilakukan dengan lebih spesifik, misalnya langsung kepada rumah tangga sasaran. Pendekatan tersebut berupa perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi. Dalam pengurangan gairs kemiskinan pelaksanaannya, Deddy mengaku masih menemui sejumlah kendala, seperti kesimpangsiuran data kemiskinan. “Perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’, telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini,” tutur Deddy. "Oleh sebab itu, keberadaan TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus lebih dioptimalkan untuk mewujudkan akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada kejelasan target, yang tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggaran,” kata Deddy. pada Rapat Koordinasi Program Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat (Deddy Mizwar; 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat dilatar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1) Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemkab KBB tahun 2016 mendapatkan nilai C sangat memalukan.
2) Banyak Aparatur Sipil Negara BPKA tidak mengerti bagaimana cara menyusun anggaran berbasis kinerja.
3) Terjadi kesimpangsiuran data kemiskinan, perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur dalam menentukan sasaran anggaran Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Peneitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis kinerja berpengaruh pada instansi pemerintah kota Bandung dan untuk mengetahui seberapa besar kejelasan sasaran anggaran pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Mengetahui berapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung.
2) Mengetahui berapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini menjadi panduan sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah lain untuk pelaksanaan rancangan anggaran dengan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran agar meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya.

Kegunaan penelitian ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dengan memudahkan pemegang tanggungjawab dalam pelaksanaan program dan mengoptimalkan anggaran yang dijalankan juga tepat sasaran kepada masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini semoga bisa berguna bagi pengembangan ilmu di mata kuliah bidang akuntansi sektor publik. Lalu penelitian yang telah diperoleh ini juga semoga dapat menjadi pengkajian dan pengembangan ilmu khususnya di mata kuliah akuntansi sektor publik bagi mahasiswa/i Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Indra Basian (2007:171) anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut “Sistem penganggaran yang berorientasi pada “*output”* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi”. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi.

Anggaran dengan pendekatan kerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Kurniawan, 2009).

Anggaran berbasis kinerja adalah “*a continium that involves the avability and use of performance information at each of the various stages of the budget proces-budget preparation, budget approval, budget execution, and audit evaluation*” (Joyce & Sieg, 2000).

Anggaran berbasis kinerja atau disingkat (ABK) merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja (Anggraini, 2010).

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kennis, 1979 dalam Trisnawati). Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial.

Menurut Bastian (2006:24) kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan (Bastian, 2006:24). Manus (2009) kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Menurut Ginting (2010), definisi kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengantujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yangbertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Menurut Kennis (2011), kejelasan sasaran anggaran adalah menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab tehadap pencapaiannya.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengertian menurut Mardiasmo (2009:201) mengenai akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Menurut Halim dalam Herawaty (2012), akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating oleh Indrianti Yulia Friska (2014) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memang berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah secara simultan. Tetapi hanya implementasi anggaran dan pelaporan anggaran yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi dari keempat variabel independen tadi.

2.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mei Anjarwati (2014) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono (2013) yang mengatakan kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

2.3 Hipotesis

Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Penerapan Akuntansi Berbasis Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

H_2 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signnifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Pengertian metode deskriptif (Sugiyono 2012:147) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pengertian metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Umi Narimawati 2010:290). Metode ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKA kota Bandung. Verifikatif menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Penelitian kualitatif dilihat dari segi tujuan adalah penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Subana dan Sudrajat 2011:25).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian deskriftif verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan mengambil kesimpulan dan menguji teori yang ada. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriftif verifikatif untuk menggambarkan dan menguji teori yang sudah ada.

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKA kota bandung. Dapat di simpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kualitatif.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel adalah sebagai penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Umi Narimawati 2010:31). Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*) (Sugiyono (2010:39). Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2).

2) Variabel Terikat *(Dependent)*

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas *(independent)* (Sugiyono (2010:40). Variabel *dependent* dalam hal ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Selengkapnya mengenai operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	ion
ANGGARAN BEREBASI KINERJA (x¹)	m penganggaran yang berorientasi pada "*ou* nisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, encana strategis organisasi. an (2007:177)	Rencana Kegiatan	Masukan	**O R D I N A L**	1
		Satuan Moneter	Efisiensi-Keluaran		2
		Jangka Waktu Tertentu	Efektifitas-Ha Bastian, (2007:179)		3

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X^2)	Sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara j spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut d ngerti oleh orang yang bertanggungjawab apaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab ran anggaran pemerintah daerah harus dinyata a jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh me bertanggung jawab untuk melaksanakannya. ng (2010:137)	Kejelasan Sasaran Anggaran	Jelas	**O R D I N A L**	4
					5
			Spesifik		6
			Dapat dipahami Sinting (2010:130)		7
AKUNTABILITAS KINERJA TANSI PEMERINT (Y)	Kewajiban pihak pemegang amanah u memberikan pertanggungjawaban, menyaji melaporkan dan mengungkapkan segala akti dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki dan kewenangan untuk meminta pertanggung ban tersebut. diasmo, 2009:201)	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kejujuran	**O R D I N A L**	8
			Akuntabilitas Hukum		9
			Akuntabilitas Proses		10
			Akuntabilitas Hukum		11
			Akuntabilitas Kebij akan (Mardiasmo, 2002:203		12

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut (Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2011:98) skala ordinal adalah skala yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diluar ukur. Dalam operasional variabel ini semua variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuisioner yang memenuhi pertanyaan-pertanyaan tipe skala *likert*.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset) di Kota Bandung.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Pengertian menurut Sugiyono (2012:115), populasi dapat didefinisikan sebagai berikut, wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2012: 90) populasis adalah sebagai berikut:

Populasi adalah wilayah generalisasi (baca: penyamarataan) yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di BPKA (Badan Pengelola Keuangan Aset) di Kota Bandung.

3.4.2 Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.

Kesimpulan dari pengertian sampel yaitu sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut apabila populasi besar dan memungkinkan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Karena dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut sudah dapat mewakili data yang ada pada populasi dan membantu penulis dalam melakukan perhitungan. Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 70 ASN (Aparatur Sipil Negara) BPKAD di kota Bandung karena dalam BPKA (Badan Pengelola Keuangan Aset) jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) sedikit maka sampel yang digunakan sampel jenuh atau sensus.

3.4.3 Waktu dan Tempat Penelitan

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penulis mengadakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung, yang beralamat di Jln.Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 16 September 2016 s.d 16 Februari 2017 dalam memenuhi penelitian ini, dan penulis melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), "*validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*" Sedangkan menurut Sugiyono (2013:3) validitas adalah menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat *test* (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product moment*. Adapun rumus dari korelasi pearson adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right]\left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

Sumber: Umi Narimawati, dkk. (2010:42)

Keterangan:
r = Koefisien korelasi *pearson product moment*
X = Skor item pertanyaan
Y = Skor total item pertanyaan
N = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument

Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) dinyatakan Barker *et al*. (2002:70) sebagai berikut, butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasi butir pernyataan ≥ 0,30. Kemudian pengujian reliabilitas menggunakan metode *alpha-cronbach* dan dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitas > 0,70.

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibitas adalah sebagai berikut:
Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman-Brown Correlation*) atau Teknik Belah Dua, dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{2r_1}{1 + r_b}$$

Sumber: Sugiyono (2013:131)

Keterangan**:**
R = *Realibility*
r_1 = Reliabilitas internal seluruh item
r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua
Adapun kriteria penilaian uji reliabilitas yang dikemukakan oleh Barker *et al*. (2002:70) dapat dilihat pada tabel 3.5.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1) Analisis deskriptif

Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

Menurut Umi Narimawati (2010:245) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

a) Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.

b) Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel=jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.

c) Dihitung skor setiap variabel/subvariabel=rata-rata dari total skor.

d) Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

e) Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini.

2) Analisis verifikatif

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut, model persamaan struktural berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*). Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci.

Indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, dan jumlah sampel yang kecil.

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Merancang model pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten Anggaran Berbasis Kinerja terdiri dari 3 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten Kejelasan Sasaran Anggaran terdiri dari 3 variabel *manifest* dan untuk variabel laten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 5 variabel *manifest.*

2) Merancang model struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran) dan satu variabel laten endogen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

3) Membangun diagram jalur

Hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

4) Menjabarkan diagram alur ke dalam persamaan matematis

Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:

a) Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.

b) Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (*latent*).

Persamaan Model Pengukuran:

Exogenous Constructs	*enous Constructs*
$X = \delta x\xi + \delta$	$Y = \delta y\eta + \varepsilon$

Sumber: Imam Ghozali (2006)

Persamaan matematis dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada diagram jalur adalah:

Persamaan model structural (*inner model*)

$\eta = {}^{\beta}\xi_{1} + y_{2} + \zeta$

1) Persamaan model pengukuran (*outer model*)

Pengukuran variabel eksogen

$X_{1.1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$
$X_{1.2} = \lambda_2 \xi_1 + \delta_2$
$X_{1.3} = \lambda_3 \xi_1 + \delta_3$
$X_{2.1} = \lambda_4 \xi_2 + \delta_4$
$X_{2.2} = \lambda_5 \xi_2 + \delta_5$
$X_{2.3} = \lambda_6 \xi_2 + \delta_6$
$X_{2.4} = \lambda_6 \xi_2 + \delta_7$
$X_{2.5} = \lambda_6 \xi_2 + \delta_8$

Pengukuran variable endogen

$Y_1 = \lambda_8 \eta + \varepsilon_1$
$Y_2 = \lambda_9 \eta + \varepsilon_2$
$Y_3 = \lambda_{10} \eta + \varepsilon_3$
$Y_4 = \lambda_{11} \eta + \varepsilon_4$
$Y_5 = \lambda_{12} \eta + \varepsilon_5$
$Y_6 = \lambda_{13} \eta + \varepsilon_6$

Interpretasi model atau hasil pengujian pada tahap ini disesuaikan dengan data teori dan analar.

5) Estimasi

Dasar yang digunakan dalam estimasi adalah *resampling* dengan *Bootestrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone (Imam Ghozali, 2006). Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahan ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).

A. Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model

struktural. Model pengukuran/*measurement model* (*outer model*) dievaluasi dengan *convergent validity and discriminant validity*.

B. Uji Kecocokan Model Pengukuran *(Outer Model)*

Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).

C. Uji Kecocokan Model Struktural *(Inner Model)*

Uji kecocokan model struktural (*fit test of structural model*) adalah uji kecocokan pada *inner model*berkaitan dengan pengujian hubungan antar variabel yang sebelumnya dihipotesiskan (Uce Indahyanti, 2013).

b) Koefisien hubungan antar variabel tersebut signifikan secara statistik yaitu dengan nilai t-*statistic* ≥ 1,645. Taraf nyata atau taraf keberartian (α) dalam penelitian ini adalah 0,05, dimana di dalam tabel distribusi normal nilainya adalah 1,645. Apabila nilai t-*statistic* ≥ 1,645 berarti ada suatu hubungan atau pengaruh antar variabel dan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan semakin baik (Uce Indahyanti, 2013).

c) Nilai koefisien determinasi (R^2 atau R-*square*) mendekati nilai 1. Nilai R^2 untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai R^2

d) menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu menerangkan variabel endogen. Nilai R^2 ini dalam PLS disebut juga Q-*square predictive relevance*. Besarnya R^2 tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2, berarti semakin baik model yang dihasilkan (Uce Indahyanti, 2013).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak.

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 2.048

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Persamaan model struktural:

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 7 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 3 indikator.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan dengan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : β = 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

H_1 : β ≠ 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 2,048.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Persamaan model struktural model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 7 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 3 indikator.

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:
Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 2,048.
3) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan
Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan pengaruh sebesar 21.75%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup yaitu sebesar 0.5303 (0.40-0.70). t_{hitung} diperoleh sebesar 3.863, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.996, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Bandung. Penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dapat disimpulkan semakin baik Penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan maka akan membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik pula.

Dalam penelitian ini kedua variabel ini belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 36% untuk variabel Penerapan berbasis kinerja dan 26% untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil tanggapan responden, yang menjadi kekurangan utama dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah indikator “efektifitas”. Berarti kekurangan terjadi pada hasil yang berberda dengan target yang direncanakan. Maka pihak pelaksana anggaran harus lebih teliti dalam melaksakan tugasnya agar mencapai hasil yang sesuai dengan program dan tepat waktu.
Pengaruh dari kedua variabel ini juga tercermin dari fenomena yang terjadi pada BPKA kota Bandung dimana masih banyak pegawai yang belum mengerti anggaran berbasis kinerja sehingga program pengentasan kemiskinan sendiri hanya 30 persennya, harusnya 80 persennya langsung ke obyek pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu Komang Sri Endrayani (2014) mengatakan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut Indrianti Yulia Friska (2014) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan. Tetapi hanya implementasi anggaran dan pelaporan anggaran yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi dari keempat variabel independen tadi. Lalu menurut Syambudi Prasetia Bahri (2012) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik.

4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan pengaruh sebesar 10.95%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Sedang yaitu sebesar 0.446 (0.40-0.69). t_{hitung} diperoleh sebesar 2.208, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.996, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Bandung. Kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dapat disimpulkan semakin baiknya sejelasan sasaran anggaran yang dibuat maka akan membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik pula.

Dalam penelitian ini kejelasan sasaran anggaran belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 42%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam kejelasan sasaran anggaran, terutama dalam indikator “jelas”. Maka dari itu tujuan sasaran anggaran harus disusun secara lebih jelas dan terperinci agar pelaksana anggaran bisa melaksanankan tugasnya dengan mudah.

Hal tersebut sesuai fenomena kejelasan sasaran anggaran dalam hal ini perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’, telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Deddy, pendekatan dapat dilakukan dengan lebih spesifik, misalnya langsung kepada rumah tangga sasaran.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut Angreini Pangumbalereang dan Sherly Pinatik (2014) yang mengatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, maka semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi akan naik pula, akan tetapi kejelasan anggaran hanya memiliki pengaruh yang kecil saja, sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut Angreini Pangumbalereang dan Sherly Pinatik (2014) yang mengatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, maka semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi akan naik pula, akan tetapi kejelasan anggaran hanya memiliki pengaruh yang kecil saja, sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh positif pada kedua variabel ini juga sesuai dengan fenomena yang terjadi pada BPKA kota bandung dimana masih banyak pegawai yang belum mengerti anggaran berbasis kinerja sehingga program pengentasannya sendiri hanya 30 persennya, harusnya 80 persennya langsung ke obyek pengentasan kemiskinan. Kejelasan sasaran anggaran dalam hal ini perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’, telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.1. *Response Rate*

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	70
Kesioner tidak kembali	10
Kuesioner kembali	80
Tingkat Pengembalian (*Response Rate*)	**88%**

Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia.

Rentan Usia	Frekuensi	Persentase
<35	3	4%
35-45	7	10%
>45	11	16%
Total		**30%**

Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	14	20%
Wanita	13	19%
Total		39%

Tabel 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
<5 Tahun	3	4%
5-10 Tahun	4	6%
>10 Tahun	18	26%
Total		**36%**

Tabel 4.5. Jumlah Reponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	3	4%
D3	3	4%
S1	16	23%
S2	5	7%
S3	0	0%
Total		**36%**

Tabel 4.6. Hasil Tanggapan Responden Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)

No. Angket	Indikator	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
1	Masukan (*Input*)	Bapak/Ibu memahami anggaran berbasis kinerja	F	21	22	12	10	5	245	254/350= **73%**	Baik
			%	60	63	34	29	14	100%		
2	Efisiensi /Keluaran	selama penerapan	F	12	18	17	11	12	217	217/350= **62%**	Cukup

		anggaran berbasis kinerja program pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar	%	34	51	49	31	34	100%		
3	Efektifitas Hasil	pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berjalan sesuai dengan yang diprioritaskan dan hasilnya sesuai dengan program	F	2	13	14	5	1	201	201/350= **57%**	Cukup
			%	11	43	77	46	23	100%		
Rata-rata										64%	Cukup

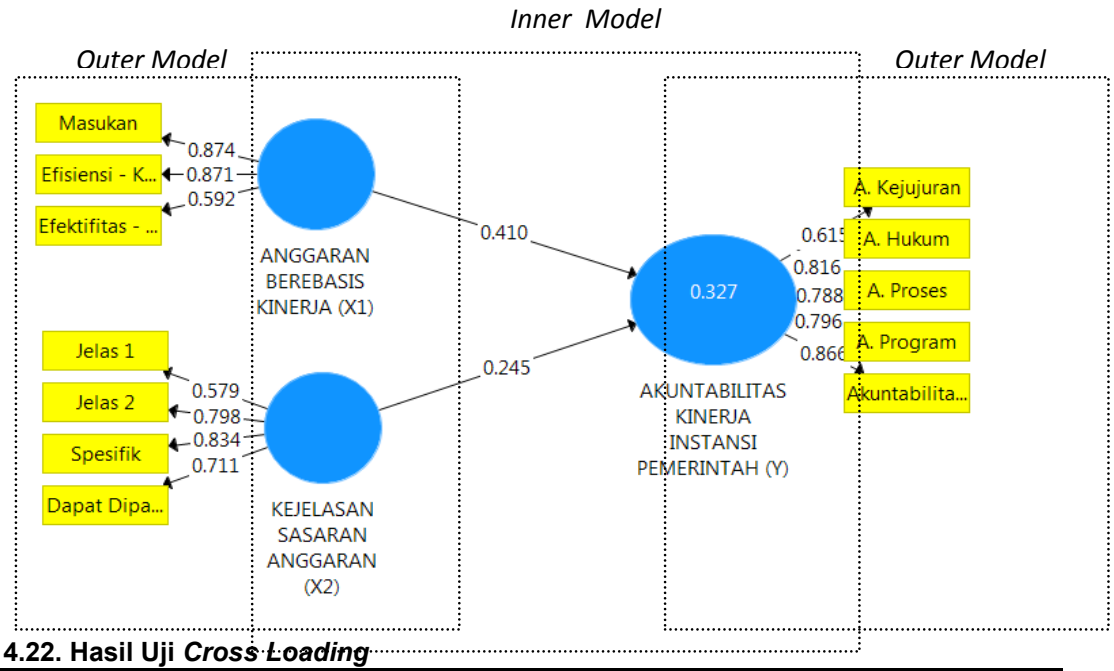
Tabel 4.7. Hasil Tanggapan Responden Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)

No. Angket	Indikator	Pertanyaan	Alternatif jawaban yang diberikan						Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
4	Jelas	Selama ini tujuan sasaran anggaran disusun jelas dan terperinci	4	8	19	23	16	4	171	171/350= **49%**	Kurang
			%	9	49	43	0	0	100 %		
5		Apakah program penanggulangan kemiskinan fokus pada target yang ditetapkan	F	2	12	39	11	6	203	203/350= **58%**	Cukup
			%		34	54	6	0	100 %	86 37 20	
6	Spesifik	Data sasaran anggaran yang telah dicapai dan dialokasikan pada tahun lalu	F	4	23	31	10	2	227	227/350= **65%**	Cukup
			%	11	66	89	29	6	100 %		
7	Dapat Dipahami	Dalam pelaksanaan realisasi dan penyusunan anggaran kesulitan yang dialami	F	4	16	30	13	7	107	107/350= **59%**	Cukup

Tabel 4.12. Hasil Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No. Angket	Indikator	Pertanyaan	Alternatif jawaban yang diberikan						Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
8	Akuntabilitas kejujuran	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawaban dan akuntabel dari pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas	F	7	30	13	13	7	227	227/350= **65%**	Cukup
			%	20	86	37	37	3	100 %		
9	Akuntabilitas hukum	Menggunakan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku	F	23	29	14	3	1	280	280/350= **80%**	Baik
			%	66	83	40	9	3	100 %		
10	Akuntabilitas proses	Anggaran yang diusulkan mencerminkan atau sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan	F	14	39	14	2	1	273	273/350= **78%**	Baik
			%	40	111	40	6	14	100 %		
11	Akuntabilitas program	Program-program anggaran dirancangkan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal	F	9	27	19	10	5	235	235/350= **67%**	Cukup
			%	26	77	54	29	0	100 %		
12	Akuntabilitas kebijakan	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik	F	13	38	18	1	0	273	273/350= **78%**	Baik
			%	37	109	51	3	0	100 %		

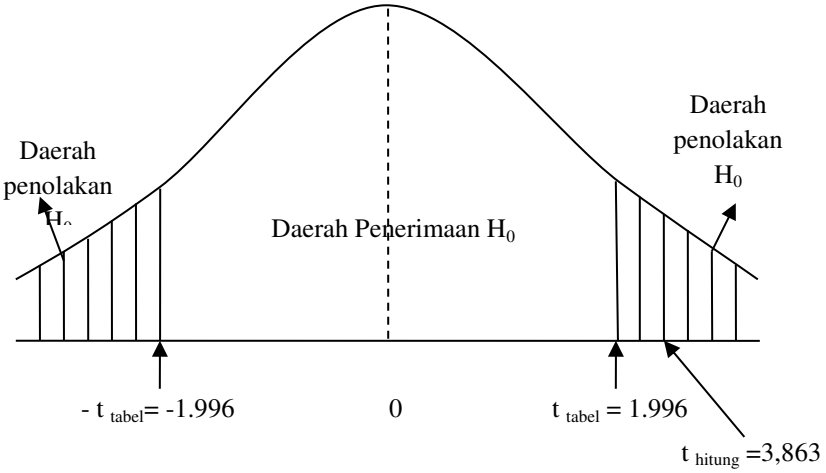
Gambar 4.6. Model Diagram Jalur Lengkap. Hasil output perhitungan dari keseluruhan model diagram jalur menggunakan *SmartPLS v.3.2.6* adalah sebagai berikut:



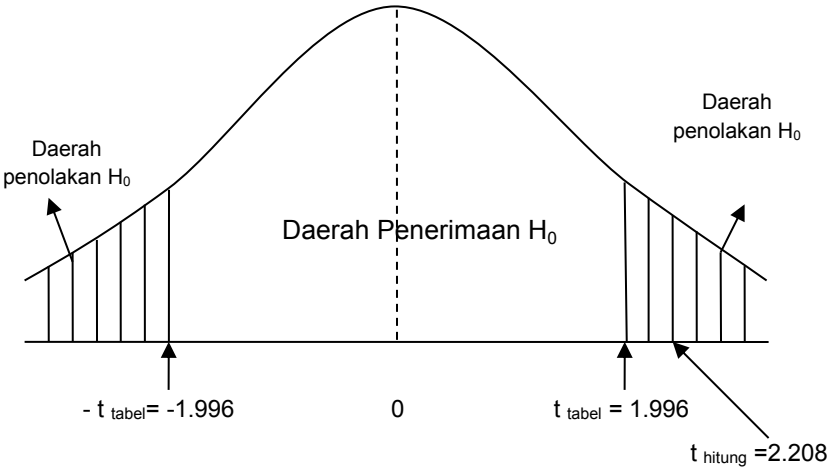
Tabel 4.22. Hasil Uji *Cross Loading*

Variabel	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Masukan	0.874	0.384	0.475
Efisiensi Keluaran	0.871	0.501	0.194
Efektifitas Hasil	0.592	0.213	0.497
Jelas (1)	0.161	0.579	0.192
Jelas (2)	0.517	0.798	0.281
Spesifik	0.361	0.834	0.439
Dapat Dipahami	0.377	0.711	0.332
Akuntabilitas Kejujuran	0.288	0.046	0.615
Akuntabilitas Hukum	0.336	0.208	0.816
Akuntabilitas Proses	0.557	0.582	0.796
Akuntabilitas Program	0.289	0.243	0.788
Akuntabilitas Kebijakan	0.445	0.366	0.866

Gambar 4.7. Daerah Penerimaan Hipotesis X_1>Y



Gambar 4.8. Daerah Penerimaan Hipotesis X_2>Y



V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta beberapa pengujian penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggarn terhadao Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKA kota Bandung, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung, hal ini menunjukan bahwa anggaran berbasis kinerja telah diterapkan sehingga instansi pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi.
2. Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada badan pengelolaan keungan daerah dan aset daerah kota bandung berpengaruh. Dengan arah hubungan yang positif, artinya saat kejelasan sasaran anggaran dilakukan dengan baik, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pun akan semakin baik pula dan juga sebaliknya.

1.1 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi permerintah, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a) Dalam meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas pengelolaan keungan dan aset daerah pemerintah kota bandung manajemen anggaran harus lebih teliti dalam pelaksanaan anggaran agar mendapatkan efektifitas hasil yang sesuai dan maksimal, baik dalam ketepatan waktu maupun kesesuaian hasil dengan program yang diberikan kepada setiap aparatur negeri sipil badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah kota bandung sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

b) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik, maka sasaran anggaran pada badan pengelolaan keungan daerah dan aset daerah kota bandung yang dibuat harus sejelas mungkin dan dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi lagi kesalahan dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak pelaksana dapat memahami.

2. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah seperti sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi permerintah pada BPKA kota Bandung bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel lebih banyak dari penulis agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di BPKA kota Bandung untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya.

VI DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat 164

Apriadi, Aap. 2010. *Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten*. Artikel Penelitian. Klaten

Anjarwati, M. 2012*. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. AAJ 1 (2) (2012*). Universitas Semarang: Semarang.

Anggraini, Yunita dan Puranta, Hendra, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*: *Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yoyakarta. UPP STIM YKPN.

Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Universitas Pasundan. Bandung.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Ehrmann Suhartono Dan Mochammad Solichin. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26

HS Ginting. 2010. *Pengaruh Patisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Indrianti Yulia Friska1. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi).

Kenis, I. 2011. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes, and Performance.* Accounting Review, October, hal. 707- 721.

Komang Sri Endrayani, I Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Volume 2.

Kumorotomo,Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas Birokrasi Publik* :*Sketsa pada masa transisi.*Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Kurniawan. 2009. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi dipublikasikan. Bandung:UPI

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 : 1. (1-17).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi

Netty Herawati, 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. ISSN: 0852-8349.

Nur Laila Yuliani, Barkah Susanto. 2014. *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik*. ISSN 2460-0784.

Sancoko, Bambang. 2008. *Kajian Artikel-Artikel Warta Pengawasan Vol XXII/ Edisi HUT Ke-32 BPKP 9 hadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI

Seri Suriani. 2015. *The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo)*. ISSN 2220–3796.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.

Umi Narimawati. 2010. *Meteodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung:Agung Media.

Umi Narimawati. 2011. *Meteodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung*: Agung Media.

Ummu Kaltsum, Abdul Rohman. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)* Universitas Diponegoro ISSN 2337:3806.

Perundang-undangan

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Keuangan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

_____ , Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.